

Penerapan Pengelolaan Keuangan Keluarga Syariah pada Masyarakat Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Atif Windawati*¹, Rola Nurul Fajria², Sartono³, Mustika Widowati⁴, Sam'ani⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Semarang, Indonesia

e-mail: *¹atifwinda@polines.ac.id, ²rola.nurulfajria@polinesa.ac.id, ³sartono@polines.ac.id,
⁴mustika.widowati@polines.ac.id, ⁵samani@polines.ac.id

Abstrak

Kabupaten Jepara merupakan daerah di Jawa Tengah yang memiliki banyak potensi ekonomi, namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara masih perlu diperhatikan. Selain itu adanya praktik rentenir yang banyak ditemukan salah satunya di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara juga perlu dicari solusinya. Dari pengamatan dan wawancara dengan masyarakat sekitar, menunjukkan mayoritas masyarakat setempat belum menerapkan pengelolaan keuangan keluarga. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan literasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan keluarga sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu keuangan keluarga dapat dikelola dengan bijak sehingga kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan aman, tenang, dan terhindar dari banyaknya hutang konsumtif. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan paparan materi oleh narasumber dan simulasi perencanaan keuangan keluarga oleh peserta pengabdian. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi terkait pengelolaan keuangan keluarga syariah dan meningkatnya inklusi keuangan syariah di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Jepara.

Kata kunci: *Desa Tubanan, Literasi Keuangan Syariah, Pengelolaan Keuangan Syariah, Perencanaan Keuangan Syariah*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Jepara merupakan daerah di Jawa Tengah yang memiliki banyak potensi ekonomi. Tidak hanya seni ukir dan industri kayu tetapi pertanian, perkebunan, perikanan bahkan industri kreatif. Sejak beberapa tahun belakangan ini Jepara banyak dilirik oleh sektor industri, baik industri di Kabupaten Jepara pada semester I tahun 2021 telah mencapai Rp3,40 Triliun dan mampu menyerap 30.313 tenaga kerja [1]

Banyaknya keunggulan yang dimiliki kabupaten Jepara tidak lantas membuat perekonomian masyarakat Jepara konsisten bertumbuh. Berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, tercatat ekonomi Jepara pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,94%. Selain itu jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2021 mencapai 95,22 ribu orang naik sebesar 4,08 ribu orang dibandingkan Maret 2020. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di kabupaten Jepara disebabkan karena Pandemi yang melanda Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Jepara[2].

Kondisi ekonomi yang sulit cenderung mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan tanpa memikirkan dampak kedepan. Banyak masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan kebutuhan konsumtif dengan meminjam uang dari lintah darat atau rentenir. Beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan pinjaman kepada rentenir yaitu karena terpaksa, tidak tahu dasar hukum terkait bunga, serta memiliki

layanan yang cepat [3]. Lebih lanjut, faktor kebutuhan, kemudahan, dan jaminan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat melakukan pinjaman kepada rentenir [4]. Praktik rentenir banyak ditemukan salah satunya di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan tuturan dari kepala desa setempat, ditemukan fakta bahwa praktik rentenir dilakukan baik secara individu, berkelompok, maupun bekedok lembaga. Maraknya praktik rentenir di daerah setempat menyebabkan banyak masyarakat terjerat hutang yang tidak ada habisnya yang bahkan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Angka perceraian di Kabupaten Jepara tercatat meningkat di tahun 2021, berdasarkan catatan Pengadilan Agama Jepara, per September 2021 ada sekitar 1.641 kasus perceraian [5]. Kepiawaian dalam pengelolaan keuangan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga [6]. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik rentenir memiliki dampak buruk bagi masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan maupun rumah tangga [7]. Praktik rentenir tidak mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Praktik rentenir tergolong praktik riba yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan, ta'awun, dan maslahat [8].

Meskipun kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat mengalami penurunan, namun kebutuhan pokok keluarga tetap harus terpenuhi. Pada kondisi keuangan yang sulit, pemenuhan kebutuhan pokok adalah hal yang utama sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier bisa ditunda untuk menghindari hutang konsumtif. Peran perempuan dalam pengelolaan keuangan berdimensi perencanaan dan pengendalian hutang berpengaruh signifikan terhadap ekonomi keluarga [9]. Lebih lanjut, perencanaan keuangan keluarga secara Islam bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan menyeluruh, namun juga kebutuhan di akhirat serta mewujudkan cara hidup berkeluarga dengan lebih baik [10]. Perencanaan keuangan syariah atau *Islamic Financial Planning*, yaitu perencanaan keuangan holistik untuk mewujudkan tujuan pribadi individu, melalui perolehan, pelestarian dan distribusi kekayaan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam [11].

Dari pengamatan dan wawancara masyarakat sekitar, menunjukkan mayoritas masyarakat setempat belum mengimplementasikan pengelolaan keuangan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan tambahan pengetahuan mengenai Pengelolaan Keuangan Keluarga. Hal itu dibutuhkan agar keuangan keluarga dapat dikelola dengan baik sehingga kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan aman, tenang, dan terhindar dari banyaknya hutang konsumtif. Selain itu tambahan pengetahuan mengenai literasi keuangan perlu diberikan untuk membuka wawasan masyarakat tentang produk tabungan atau investasi syariah yang sesuai dengan tujuan keuangan keluarga. Hasil penelitian menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga [12]. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi (SNLKI) yang dilaksanakan OJK di 2022, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 9,14 persen, sementara indeks literasi keuangan konvensional mencapai 49,68 persen [13].

2. METODE PENGABDIAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Pemecahan masalah mitra dilakukan melalui 3 (tiga) metode yaitu diskusi, pelatihan, serta pendampingan. 1). Diskusi ditujukan untuk menggali akar permasalahan dan merumuskan solusi masalah yang dihadapi mitra. Tim pengabdian kepada masyarakat dari Politeknik Negeri Semarang melakukan diskusi dan wawancara dengan mitra pengabdian yaitu Desa Tubanan mengenai spesifikasi kesulitan dalam melakukan pengelolaan keuangan keluarga, literasi keuangan syariah, menentukan prioritas kebutuhan keluarga, dan membuat anggaran. Selain itu diskusi juga dilakukan dengan KSPPS Artha Mitra Famili yang juga menjadi mitra pengabdian agar terlaksana kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat. 2). Kegiatan pelatihan yang terdiri dari pemaparan materi dan simulasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Melalui pelatihan ini diharapkan para mitra termotivasi dalam penerapan anggaran yang tepat, memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan anggaran, memprioritaskan kebutuhan keluarga yang bersifat wajib, dan menyesuaikan gaya hidup dengan anggaran yang dimiliki. 3). Pendampingan ditujukan untuk terus memotivasi masyarakat di Desa Tubanan,

Jepara agar dapat membuat pengelolaan keuangan keluarga sesuai dengan prinsip syariah. Rendahnya latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan wawasan yang mereka miliki merupakan tantangan tersendiri bagi tim pengabdian dalam menerapkan keterampilan baru, sehingga sangat dibutuhkan pendampingan dan motivasi agar mereka dapat mengimplementasikan perencanaan keuangan keluarga dengan tepat dan konsisten.

2.2 Profil Mitra

Mitra kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan KSPPS Artha Mitra Famili yang berlokasi di Jalan Raya Wedelan - Bangsri RT.01 Rw.09 Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Jumlah peserta pengabdian berjumlah 20 orang warga Desa Tubanan.

2.3 Prosedur Pelaksanaan Pengabdian

Prosedur pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1 Prosedur Pelaksanaan Pengabdian

2.3.1 Pra-kegiatan

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan pra-kegiatan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Kepala Desa Tubanan untuk mendiskusikan kebutuhan penyelesaian masalah mitra, sasaran atau peserta pengabdian, lokasi, serta mekanisme pelaksanaan pengabdian. Mitra berpartisipasi dalam menyediakan tempat dan peserta pengabdian.

2.3.2 Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kantor Kepala Desa Tubanan. Kegiatan berdurasi 3 jam mulai dari jam 09.00-12.00 WIB. Pengabdian Masyarakat ini menghadirkan dua narasumber. Pemateri pertama yaitu Atif Windawati, S.ST., MBA. yang merupakan dosen perbankan syariah Politeknik Negeri Semarang sekaligus perencana keuangan syariah yang menyampaikan materi mengenai pengelolaan keuangan syariah. Pemateri kedua yaitu bapak Muhammad Rifa'i selaku pengelola KSPPS Artha Mitra Famili yang menyampaikan materi terkait produk-produk Lembaga Keuangan Syariah.

2.3.3 Evaluasi

Kegiatan ini akan dilakukan 3 evaluasi, yaitu evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Evaluasi awal dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman kelompok terhadap pengelolaan keuangan keluarga sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan keseriusan mitra dalam kegiatan diskusi dan pelatihan. Evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui tingkat penyerapan ipteks yang diberikan oleh tim pengabdian. Lebih lanjut kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi pada peningkatan jumlah kesadaran masyarakat Desa Tubanan terhadap pengelolaan keuangan keluarga sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada peserta pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

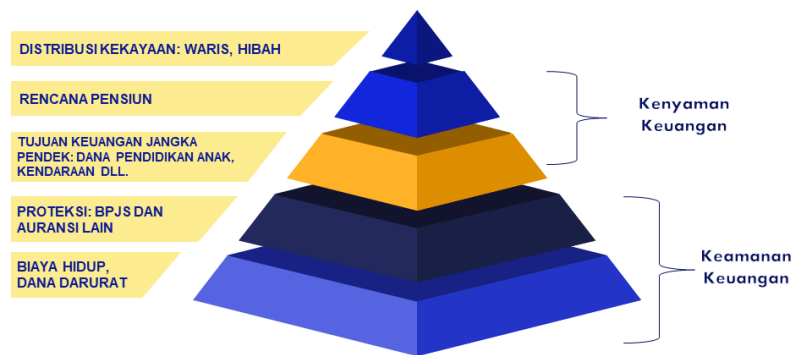
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pelatihan yang terdiri dari pemaparan materi dan simulasi terkait pengelolaan keuangan keluarga.



Gambar 2 Pemaparan Materi oleh Narasumber Pertama

Gambar 2 menunjukkan kondisi pada saat sesi pemaparan materi yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama yaitu transfer ilmu pengetahuan terkait manajemen pengelolaan keuangan keluarga syariah. Paparan materi berisi tentang arti penting dan manfaat pengelolaan keuangan keluarga, siklus hidup manusia dalam keuangan, piramida perencanaan keuangan, alokasi penghasilan yang sehat, *financial check-up*, langkah-langkah melakukan perencanaan keuangan syariah, kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan, dan lembaga keuangan syariah untuk membantu mewujudkan tujuan keuangan. Selain itu juga dipaparkan motivasi untuk membangun kesadaran peserta untuk melakukan pengelolaan keuangan secara syariah agar peserta memiliki kesehatan finansial dan mampu meraih tujuan keuangan dengan berkah. Berikut beberapa materi yang disampaikan pada pemaparan materi sesi 1.

Piramida Perencanaan Keuangan



Gambar 3 Piramida Perencanaan Keuangan

Gambar 3 merupakan piramida perencanaan keuangan yang menunjukkan bahwa perencanaan keuangan dimulai dari keamanan keuangan lalu kenyamanan keuangan. Keamanan keuangan meliputi biaya hidup dan proteksi seperti BPJS dan asuransi. Sedangkan Kenyamanan keuangan meliputi tujuan keuangan jangka pendek, rencana pensiun, dan distribusi kekayaan berupa waris dan hibah [14].



Gambar 4 Alokasi Penghasilan Yang Sehat

Gambar 4 menunjukkan alokasi penghasilan yang sehat meliputi zakat, infaq, dan sadaqah (ZISWAF), proporsi hutang, tabungan masa depan, biaya hidup, dan gaya hidup. Pertama, sebaiknya pengasilan dialokasikan untuk ZISWAF sebesar 10%, hutang diperbolehkan maksimal 35%, tabungan masa depan minimal 10%, biaya hidup maksimal 30%, dan gaya hidup maksimal 15% [14]. Prosentase tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu asal pada pos hutang tidak melebihi 35% dan alokasi penghasilan pada tabungan masa depan minimal sebesar 10%.



Gambar 5 Alur Perencanaan Keuangan Keluarga

Gambar 5 menunjukkan langkah-langkah perencanaan keuangan keluarga. Perencanaan keuangan dimulai dari menentukan tujuan keuangan, mencatat aset dan kewajiban, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun strategi untuk meraih tujuan keuangan, dan memilih instrumen investasi yang tepat sesuai profil risiko, jangka waktu, dan tujuan investasi. Setelah itu, rencana keuangan diimplmentasikan sesuai strategi yang telah disusun. Terakhir yaitu monitor dan evaluasi [14].

Sesi pemaparan materi kedua berisi sosialisasi produk-produk KSPPS Artha Mitra Famili sebagai Lembaga keuangan syariah. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggandeng KPSS Artha Mitra Famili sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk keuangan syariah bagi masyarakat setempat. Peserta pengabdian akan mendapatkan bantuan inklusi keuangan dari kegiatan pengabdian sebesar Rp.100.000, - berupa simpanan pada KSPPS Artha Mitra Famili. Selain meningkatkan literasi keuangan, pengabdian ini secara nyata meningkatkan inklusi keuangan syariah di Desa Tubanan.

Setelah sesi materi usai dilanjutkan sesi tanya jawab. Lalu agenda pengabdian dilanjutkan dengan simulasi penyusunan anggaran keuangan keluarga yang ditunjukkan pada Gambar 6. Guna menunjang keberhasilan simulasi, tim pengabdian membagikan *form* kepada peserta pengabdian untuk menyusun anggaran keuangan keluarga. Dengan metode simulasi diharapkan masyarakat dapat mengimpelentasikan secara langsung ilmu yang telah didapatkan selama pelatihan. Metode ini memberikan pengalaman secara langsung bagi peserta dalam

menyusun rencana keuangan keluarga. Acara pelatihan diakhiri dengan kuis untuk menggali pemahaman peserta terkait materi dan pelatihan yang sudah diberikan.



Gambar 6 Simulasi Penyusunan Anggaran Keuangan Keluarga

Hasil yang dicapai dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang pertama adalah peningkatan literasi peserta terkait pengelolaan keuangan keluarga syariah. Dari Tabel 1 terlihat adanya peningkatan literasi peserta terkait pengelolaan keuangan keluarga. Peningkatan pemahaman ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan keluarga.

Tabel 1 *Pre Test* dan *Post Test* Pelatihan

No	Pernyataan	Prosentase Jawaban Benar		Peningkatan Pengetahuan
		Pre	Post	
1	Pengelolaan keuangan yang sehat dimulai dengan memiliki dana darurat	100	100	0
2	BPJS tidak harus dimiliki oleh keluarga sebelum membeli mobil	30	40	10
3	Keluarga yang sehat keuangannya tidak memiliki hutang melebihi 50% dari penghasilan	45	55	10
4	Menyimpan uang di celengan lebih baik dibandingkan di Bank	100	100	0
5	Membeli kendaraan bermotor merupakan bentuk investasi	75	75	0

Sumber: data primer, 2022

Pencapaian hasil selanjutnya dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah peningkatan inklusi keuangan syariah di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Jepara. Seluruh peserta sejumlah 20 orang bersedia mendaftar anggota dan membuka simpanan pada KPPS Mitra famili dengan dana bantuan dana inklusi yang diperoleh.

Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga ini diikuti peserta dengan antusias. Pelatihan ini memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi peserta karena selama ini peserta belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan keluarga syariah. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pelatihan memperoleh penilai yang sangat baik dari para peserta dan mereka termotivasi mengaplikasikan pengetahuan baru yang diperoleh terkait pengelolaan keuangan keluarga.

Tabel 2 Evaluasi Pelatihan

No	Pernyataan	Prosentase		
		1	2	3
1	Materi yang disampaikan bermanfaat manambah pengetahuan.	5	55	40
2	Materi yang disampaikan menggugah semangat untuk melakukan perencanaan keuangan keluarga dengan prinsip syariah	0	30	70
3	Pembicara menarik dan menyenangkan	0	60	40
4	Penyelenggara acara baik	0	65	35
5	Konsumsi baik	0	70	30

1: tidak setuju, 2: setuju, 3: sangat setuju

Sumber: data primer, 2022

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan perencanaan keuangan keluarga. Tabel 3 menunjukkan adanya kenaikan prosentase keinginan untuk implementasi perencanaan keuangan keluarga setelah mengikuti pelatihan. Tentu saja dukungan dari tim pengabdian masih sangat diperlukan untuk membantu mitra lebih cakap lagi dan konsisten dalam mengelola keuangan keluarga.

Tabel 3 Evaluasi Keinginan Implementasi Perencanaan Keuangan Keluarga Sebelum dan Setelah Pelatihan

No	Pernyataan	Prosentase jawaban			
		Pre		Post	
		Belum	Sudah	Belum	Sudah
1	Saya ingin memiliki dana cadangan untuk keperluan yang bersifat tidak terduga	40	60	35	65
2	Saya ingin menyisihkan penghasilan setiap bulan untuk tabungan	20	80	15	85
3	Saya ingin memiliki BPJS Kesehatan	70	30	25	75
4	Saya ingin memiliki catatan penghasilan dan pengeluaran tiap bulan	65	35	50	50

Sumber: data primer, 2022

4. KESIMPULAN

Hasil utama dari pengabdian masyarakat ini yaitu peningkatan literasi peserta terkait pengelolaan keuangan keluarga syariah yang tercermin pada hasil *pre-test* dan *post-test*. Solusi yang diberikan kepada mitra untuk mengatasi masalah sangat tepat yakni dengan memberikan pelatihan mengenai penyusunan anggaran keuangan keluarga syariah sebagai usaha untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga guna mewujudkan keluarga yang sehat secara finansial. Di samping itu paparan materi terkait produk-produk di KSPPS Artha Mitra Famili juga memberikan solusi bagi peserta untuk menemukan produk keuangan syariah yang aman, halal, menguntungkan, serta mudah dijangkau oleh masyarakat peserta pengabdian. Selain meningkatkan literasi keuangan terkait pengelolaan keuangan syariah, kegiatan ini juga meningkatkan inklusi keuangan syariah di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang ditunjukkan dengan kesediaan masyarakat membuka rekening pada KSPPS Artha Mitra Famili setelah mengikuti pelatihan.

5. SARAN

Saran untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya adalah memberikan pelatihan dan pendampingan pengelolaan perencanaan keuangan untuk tujuan keuangan yang lebih spesifik misalnya untuk dana pendidikan anak atau untuk dana ibadah haji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Semarang dan Kepala Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang telah memberi dukungan terhadap kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] DiskominfoJepara, "Realisasi Investasi Rp3,40 Triliun Serap 30.313 Tenaga Kerja." Accessed: Feb. 24, 2022. [Online]. Available: <https://jepara.go.id/2021/09/23/realisasi-investasi-rp340-triliun-serap-30-313-tenaga-kerja/>
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, "Berita resmi statistik No. 08/12/3320/Th. II, 01 Desember 2021," 2022. Accessed: Feb. 24, 2023. [Online]. Available: <https://jeparakab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/74/profil-kemiskinan-kabupaten-jepara-maret-2021.html>
- [3] Fauziah, A. Abubakar, and H. Basri, "Praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang (studi pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo)," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 117–127, 2022, doi: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9524](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9524).
- [4] D. Mailisa, "Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat memilih melakukan peminjaman kepada rentenir dibandingkan Bank Syariah di Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo," *Jurnal Margin*, vol. 3, no. 1, pp. 52–70, 2023, doi: <https://doi.org/10.30631/margin.v3i1.1446>.
- [5] F. Hidayat, "Pendapatan dan gaji istri lebih tinggi jadi penyebab perceraian tinggi di Jepara," <https://wartaekonomi.co.id/>, 2021. Accessed: Feb. 24, 2023. [Online]. Available: <https://wartaekonomi.co.id/read364222/pendapatan-dan-gaji-istri-lebih-tinggi-jadi-penyebab-perceraian-tinggi-di-jepara>
- [6] R. Nurdiansari and A. Sriwahyuni, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 2, no. 1, pp. 27–32, 2020, doi: <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i1.144>.
- [7] Zaenudin, R. Trihantana, and M. Anwar, "Analisis dampak praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor," *Sahid Banking Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 129–140, 2022, doi: <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.73>.
- [8] U. Khasanah, Muh. W. Abdullah, and A. K., "Dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang eceran dalam perspektif Ekonomi Islam," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1, pp. 13–26, 2019, doi: <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119>.
- [9] A. A. D. Setyoningrum and K. Nindita, "Perempuan, Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Keluarga," *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, vol. 8, no. 2, pp. 12–20, 2020, doi: <https://doi.org/10.36596/ekobis.v8i2.484>.
- [10] E. T. Wahyuningtyas, D. A. Susesti, M. Hariasih, R. F. H. Nabila, and N. Yolanda, "Perencanaan Keuangan Rumah Tangga Islami," *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 4, pp. 397–403, 2022, doi: <https://doi.org/10.55681/swarna.v1i4.162>.
- [11] H. Ahmed and A. M. H. A. P. M. Salleh, "Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 9, no. 2, pp. 170–189, 2016, doi: 10.1108/IMEFM-01-2015-0006.

- [12] I. Trisuci, “Pengaruh literasi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan melalui pengelolaan keuangan keluarga pada usaha mikro Kabupaten Batang Hari,” *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, vol. 12, no. 01, pp. 181–193, 2023, doi: <https://doi.org/10.22437/jmk.v12i01.18369>.
- [13] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “SP 82/DHMS/OJK/XI/2022 tentang Siaran pers survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022,” 2022. Accessed: Feb. 24, 2023. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- [14] Ifac Academy, “Modul Associate Wealth Planner (AWP) Syariah,” *Ifac Academy*. 2022.